

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan Tata tertib dan Karakteristik Peraturan

Pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹ Juga dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti perihal (perbuatan, usaha dsb) melaksanakan (rancangan dsb).² Tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat bagi orang-orang yang dimana peraturan tersebut berlaku, dalam kamus bahasa Indonesia tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus diturut atau dilakukan disiplin.³ Dalam pengertian tersebut, mengandung makna bahwa aturan-aturan yang berlaku secara langsung mengikat setiap anggota yang berada dalam lingkungan tersebut, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah, negara, maupun kelompoknya.

Dalam menetapkan suatu tata tertib sekolah diperlukan suatu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam membuat tata tertib atau peraturan sekolah.

Clemes dan Bean menyebutkan karakteristik apa saja yang perlu ada dalam suatu peraturan, yaitu :

¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan> diunduh pada 20 Desember 2011, pukul.15.20 WIB.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 553.

³ *Ibid.*, h. 1025.

1. Peraturan itu harus masuk akal, maksudnya adalah peraturan itu haruslah dapat dilakukan oleh anak atau peserta didik serta efektif dalam pelaksanaannya.
2. Peraturan dipatuhi atau dilanggar, maksudnya peraturan itu apakah dapat dipatuhi atau memang dilanggar oleh anak atau peserta didik dengan memperhatikan dan memeriksa hasil akhir dari suatu kegiatan.
3. Peraturan harus dirinci secara tuntas, maksudnya peraturan atau tata tertib itu dapat dipahami maksud dan tujuannya, serta akibat yang ditanggung apabila melanggarnya ada sosialisasinya.
4. Penetapan batas waktu, yaitu mengenai kapan suatu peraturan itu harus dipatuhi, adanya peringatan apabila suatu peraturan dilanggar, serta adanya konsistensi dalam peraturan.
5. Harus ada akibat yang terjadi apabila peraturan dilanggar, maksudnya harus ada konsekuensi dari suatu pelanggaran terhadap peraturan baik itu sanksi, atau yang lainnya.⁴

Dari karakteristik peraturan yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal disini, yang pertama adalah bahwa peraturan yang ada memiliki benang merah yang berkaitan erat, antar peserta didik dengan penegak peraturan (wakasek bidang kesiswaan ataupun guru BP). Yang kedua harus adanya kejelasan dan suatu peraturan tidak mengandung multitafsir atau ambiguitas.

Pendidikan karakter di Indonesia sendiri memiliki sembilan pilar karakter dasar, yaitu: (1) Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, (3) Jujur, (4) Hormat dan santun, (5) Kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, (7) Keadilan

⁴ Haris Clemes dan Reynold Bean, *Cara Mendisiplinkan Anak Tanpa Merasa Bersalah* (Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1995), h. 50.

dan kepemimpinan, (8) Baik dan rendah hati, (9) Toleransi, cinta damai, dan persatuan.⁵

Dalam pendidikan karakter, nilai kedisiplinan ini mengandung arti tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selain yang tertera pada karakteristik pendidikan karakter di Indonesia, Heritage Foundation dan Ari Ginanjar A juga menyantumkan nilai disiplin pada nilai pendidikan karakternya⁶.

Dalam menilai ketaatan atau kedisiplinan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dapat digunakan teori perkembangan moral dari Kohlberg. Kohlberg mengidentifikasikan perkembangan moral menjadi tiga tingkatan, dimana tiap bagian itu memiliki dua tahapan.

1. Tingkat Pra-konvensional.⁷

Pada tingkat ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik atau buruk, tetapi ia menafsirkan baik atau buruk ini dalam rangka maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari tindakannya (hukuman fisik, penghargaan, tukar-menukar kebaikan).

Pada tingkat ini anak tanggap terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungannya. Dalam tahap ini anak hanya mengerti pada tataran baik dan buruk serta benar dan salah. Namun penangkapan pada nalar anak seusia ini adalah pada kenyataan fisik yang diterimanya akibat perbuatan yang anak tersebut lakukan. Seperti pada hukuman maupun penghargaan yang bersifat nyata seperti pemberian

⁵ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter:Konsepsi dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 72.

⁶ *Ibid.*, h. 75.

⁷ Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 24.

hadiah, permen ataupun kue. Kecenderungan utamanya dalam interaksi dengan orang lain adalah menghindari hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan hedonistis, dalam tingkat prakonvensional ini dibagi menjadi dua tahap :

Tahap satu : Orientasi hukuman dan kepatuhan.⁸

Tahap dua : Orientasi instrumentalistis.⁹

Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti dari nilai manusiawi tidak diperhatikan. Menghindari hukuman dan kepatuhan buta terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya. Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut.¹⁰

Tahap pertama ini anak akan patuh pada aturan semata-mata untuk menghindarkan hukuman, belum ada kesadaran secara dalam diri sendiri bahwa anak memang harus menaatinya karena seseorang sudah terikat pada lingkungannya.

Sementara pada tahap Orientasi instrumentalistis pada tahap ini tindakan seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memeralat orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan dagang. Unsur-unsur keterbukaan, kesalingan dan tukar-menukar merupakan prinsip tindakannya dan hal-hal itu ditafsirkan dengan cara fisik dan pragmatis. Prinsip

⁸ *Ibid.*, h. 24.

⁹ *Ibid.*, h. 24.

¹⁰ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 137.

kesalingan adalah, "kamu mencakar punggungku dan aku akan ganti mencakar punggungmu".

Tahap yang kedua anak akan menyesuaikan diri untuk mendapatkan ganjaran, kebajikannya dibalas. Ada hubungan sebab-akibat dalam tahapan ini, jika berbuat baik maka akan mendapat kebaikan dari orang lain, begitu pula sebaliknya bila berbuat buruk atau tidak baik maka seseorang itu akan mendapatkan hukuman yang berlaku.

2. Tingkat Konvensional.¹¹

Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai individu ditengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenaran sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi.

Kecenderungan orang pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat pra-konvensional perasaan dominan adalah takut, pada tingkat ini perasaan dominan adalah malu. Tingkat ini terdiri dari dua tahap :

Tahap 3 : Orientasi kerukunan atau orientasi good boy-nice girl.¹²

Tahap 4 : Orientasi ketertiban masyarakat.¹³

Pada tahap orientasi kerukunan ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-harapan lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai "orang baik". Tujuan

¹¹ Asri Budiningsih. *Op.Cit*, h. 25.

¹² Asri Budiningsih. *Op.Cit*, h. 25.

¹³ Asri Budiningsih. *Op.Cit*, h. 26.

utamanya, demi hubungan sosial yang memuaskan, maka seseorang pun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat atau bangsanya.

Tahap ketiga anak akan menyesuaikan diri untuk menghindari ketidaksetujuan, atau ketidaksenangan orang lain. Tahapan ini menunjukkan bahwa seorang anak menaati peraturan sebagai upayanya agar tidak disalahkan atau tidak dibenci oleh kelompoknya.

Pada tahap orientasi ketertiban masyarakat tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas, peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. Tingkah laku yang baik adalah memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya

Tahap keempat anak menyesuaikan diri untuk menghindari penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya. Membebaskan diri dari teguran pejabat yang memegang kekuasaan, serta menjaga atau melestarikan aturan-aturan umum.

3. Tingkat Pasca-konvensional.¹⁴

Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini sadar bahwa hukum merupakan kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tingkat ini memiliki dua tahap :

Penjelasan dari yang dikemukakan oleh Kohlberg pada tingkat pasca konvensional dapat diartikan, pada tingkat ini seseorang mengerti bahwa seseorang

¹⁴ *Ibid.*, h. 27.

berada dibawah kekuasaan hukum, keterikatan ini mengakibatkan bila dilaksanakannya peraturan tersebut berpengaruh pada ketertiban dan kesejahteraan umum.

Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial legalitas¹⁵

Tahap 6 : Orientasi prinsip kewajiban¹⁶

Pada tahap orientasi kontrak sosial legalitas tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian orang ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat pribadi. Ada kesadaran yang jelas untuk mencapai konsensus lewat peraturan-peraturan prosedural. Disamping menekankan persetujuan demokratis dan konstitusional, tindakan benar juga merupakan nilai-nilai atau pendapat pribadi. Akibatnya, orang pada tahapan ini menekankan pandangan legal tapi juga menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional.

Pada tahap kelima, anak akan menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dirinya dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap orientasi prinsip kewajiban orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormati. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip moral universal.

¹⁵ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak* (Jakarta : Bina Aksara), h. 75.

¹⁶ *Ibid.*, h. 75.

Tahap keenam anak akan menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri. Ada keinginan untuk berada pada derajat yang tinggi atas penghormatan dirinya sebagai manusia yang utuh.

Kohlberg juga menjelaskan bahwa tanggapan terhadap perbuatan moral pada anak-anak lebih banyak diberikan mengenai akibat, sedangkan pada anak-anak yang lebih besar (lebih tinggi umurnya) lebih banyak mengenai tujuan.¹⁷

"Sebuah sekolah tanpa kedisiplinan adalah seperti kincir tanpa air," demikian Komensky dalam buku Pendidikan Karakter Doni Koesoema menggambarkan pentingnya kedisiplinan di dalam sekolah. Komensky melihat ada tiga tujuan yang berkaitan dengan kedisiplinan ini.

Pertama, kedisiplinan hanya diterapkan bagi mereka yang melanggar keteraturan tersebut. *Kedua*, materi bagi kedisiplinan bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, melainkan kebiasaan-kebiasaan buruk peserta didik sehingga pembelajaran dan sekolah itu tertata dengan lebih baik, dan *ketiga*, kedisiplinan mulai menampakkan pertumbuhannya, sama seperti biji tanaman yang baru tumbuh, benih itu mesti dengan penuh kesabaran dirawat.¹⁸

Di sini Komensky mengartikan kedisiplinan merupakan proses pengajaran, pelatihan, seni mendidik, dan materi kedisiplinan dalam sekolah. Tatatertib merupakan hal yang harus dipatuhi dan ditaati, sehingga penegakan peserta didik pada setiap pelanggaran merupakan suatu proses penyampaian dan pembelajaran hal-hal yang baik. Setiap pemberian hukuman pada suatu kesalahan merupakan proses

¹⁷ Singgih D Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2006), h. 196.

¹⁸ Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter:Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 236.

pengajaran mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga seseorang atau peserta didik mengerti dan memahami peraturan secara lebih mendalam. Tidak seperti seseorang yang dilepas di hutan dan menemukan norma-norma dengan sendirinya tanpa suatu evaluasi yang terjadi, namun anak yang berada dalam lingkungan sekolah diajarkan berbagai hal mengenai nilai-nilai hidup yang benar.

Sri Minarti dalam bukunya *Manajemen Sekolah* mengatakan, Penegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan peserta didik, namun sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya.¹⁹ Seperti yang diungkap sebelumnya jika kebebasan peserta didik dibatasi mengakibatkan terlampau dikurangi, dikekang dengan peraturan, peserta didik akan berontak dan mengalami frustrasi kecemasan.

Peraturan yang ada atau tata tertib di sekolah, bukan menunjukkan bahwa sekolah membatasi kebebasan peserta didiknya, memperoleh kebebasan yang luas bukan berarti menghalangi kebebasan peserta didik yang lain.

Namun demikian, mulianya tujuan penegakan disiplin sering tidak mendapat respon yang positif dari siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu,

- (a) kepemimpinan guru atau kepala sekolah yang otoriter yang menyebabkan sikap peserta didik yang agresif ingin berontak akibat kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi;
- (b) kurang diperhatikannya kelompok minoritas baik yang berada di atas rata-rata maupun yang berada di bawah rata-rata dalam berbagai aspek yang ada hubungannya dengan kehidupan di sekolah;
- (c) peserta didik kurang dilibatkan dan diikutsertakan dalam tanggung jawab sekolah;
- (d) latar

¹⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2011), h. 193

belakang kehidupan keluarga; (e) sekolah kurang kerja sama dan saling melepas tanggung jawab.²⁰

Dari kelima faktor yang disebutkan diatas, jelas dapat dilihat bahwa keberhasilan suatu sekolah dalam pelaksanaan tata tertib membutuhkan seluruh elemen sekolah. Tata tertib yang dibuat bukan hanya berlaku bagi peserta didik namun juga berlaku bagi seluruh warga sekolah di dalamnya. Selain sekolah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tata tertib, lingkungan diluar sekolah juga menentukan. Peserta didik di lingkungan keluarga maupun lingkungan rumahnya dan pergaulannya.

Bentuk dari sebuah hasil dari pelaksanaan tata tertib adalah hukuman dan reward atau hadiah, sebagai bentuk dari hasil perbuatan peserta didik dari tata tertib yang ada, apakah peserta didik yang melaksanakan atau melanggar peraturan itu sendiri. Pemberian hadiah atau reward dan hukuman biasanya memiliki berbagai pertimbangan dalam penetapannya. Hukuman atau sanksi serta penghargaan, apresiasi yang diberikan kepada peserta didik harus didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

(a) penghargaan atau hukuman diberikan atas dasar fungsi yang sebenarnya; artinya pada situasi tertentu penghargaan atau hukuman perlu diberikan secara tepat; (b) penghargaan atau hukuman diberikan disesuaikan dengan tingkah laku dan kepribadian peserta didik ; (c) penghargaan atau hukuman harus dikaitkan dengan tujuan yang jelas artinya diarahkan untuk mempermudah proses pendidikan.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 126.

²¹ *Ibid.*, h. 198.

Dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat menekan tingkah laku yang kurang baik, Sedangkan apresiasi atau penghargaan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang dapat diulang pada situasi dan kondisi yang tepat. Seperti yang telah dikemukakan diatas pada tujuan Komensky mengenai tujuan kedisiplinan, penegakkan peraturan yang ada bagi pelanggarnya adalah sebuah pembelajaran kearah yang lebih baik.

Dalam bukunya Geof Colvin menyebutkan, ada 7 langkah dalam menyusun rencana disiplin kelas proaktif. Komponen-komponen rencana disiplin proaktif sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pernyataan tujuan
2. Perilaku yang diharapkan di sekolah
3. Mengajarkan perilaku yang diharapkan
4. Mempertahankan perilaku yang diharapkan
5. Perbaiki perilaku bermasalah
6. Menggunakan data
7. Mempertahankan rencana jangka panjang²²

Seperti yang telah disebutkan diatas pelaksanaan tata tertib memiliki rangkaian yang cukup panjang, dari pembangunan pondasi ketaatan, lalu sosialisasi dan pemberian contoh yang sesuai dengan tata tertib, memberikan reward lalu pembinaan

²² Geolf Colvin, *7 Langkah untuk Menyusun Rencana Disiplin Kelas Proaktif* (Jakarta : PT Indeks, 2008), h. 41.

baik pertahanan sikap yang baik dan perbaikan sikap yang tidak baik, dan pada tahap pendataan dan evaluasi.

Untuk menunjang dalam pelaksanaan tata tertib harus dilakukan sosialisasi terhadap peraturan itu sendiri. Dalam teorinya Michael Rush dan Philip Althof mengemukakan ada beberapa segi penting dari sosialisasi :

1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman.
2. Hasil belajar itu berupa tingkah laku individu yang mencakup batas-batas yang luas, khususnya mengenai pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap.
3. Sosialisasi itu tidak terbatas pada masa anak-anak atau remaja, melainkan berlangsung sepanjang kehidupan. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan. Bagi aktivitas sosial dan secara implisit atau eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.²³

Sartain seorang ahli psikologi Amerika mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan manusia kecuali gen-gen.

Sartain membagi lingkungan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Lingkungan alam atau luar
2. Lingkungan dalam
3. Lingkungan sosial²⁴

Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi orang tersebut. Pengaruh lingkungan sosial itu ada yang diterima langsung dan tidak

²³ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 198.

²⁴ M. Ngilim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 71-72.

langsung. Secara langsung yaitu melalui pergaulan, teman sebaya, dan lingkungan rumah.

B. Pendidikan Dalam Pengelolaan Militer, Yayasan Kartika Jaya

Konsep pendidikan Militer terkenal dengan sifat yang keras dan tegas, karena tugas pokok prajurit adalah bertempur dengan menggunakan senjata, maka suasana pendidikan yang keras sengaja diterapkan dan diciptakan. Tidak mengherankan jika setiap pendidikan militer berpotensi untuk terjadinya kekerasan apabila tidak ada norma-norma yang tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan penerapannya di lapangan. Persoalannya adalah dinamika di lapangan biasa terjadi di luar kontrol dari rumusan kurikulum formal. Padahal kurikulum tersebut sudah disusun sedemikian rupa, agar tidak terjadi ekses kekerasan. Dengan kata lain, kemungkinan ekses kekerasan dapat terjadi di mana pun sebagai risiko dari setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan militer.

Kaitannya dengan masalah kepemimpinan, hal ini dapat dijelaskan dari pembahasan berikut. Sejauh mana gaya kepemimpinan para perwiranya terbentuk dalam suatu tradisi pendidikan tertentu dapat mendukung bagi timbulnya fenomena kekerasan. Secara hipotesis bisa dikatakan bahwa semakin intensif dilaksanakannya penonjolan materi pembinaan fisik, tanpa dilandasi secara proposional oleh materi pembinaan mental kepribadian, maka dimungkinkan terjadinya ekses kekerasan.

Penyajian materi pelajaran sesuai kurikulum pada pendidikan pembentukan perwira (Akademi TNI, Sepa dan Secapa) disetiap matra pada prinsipnya menempuh

3 (tiga) kegiatan, yaitu pembekalan, pelatihan, dan bimbingan pengasuhan. Semua program kegiatan ini direncanakan sedemikian rupa agar tujuan pendidikan perwira dapat tercapai. Ketiga kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan secara terpadu dalam satu paket kurikulum yang meliputi pelajaran kepribadian, intelegensia/pengetahuan, dan fisik/keterampilan. Bila dilihat dari kapasitas materinya, jelas tidak ada yang sengaja dirancang untuk mengarah kepada terciptanya tindakan kekerasan. Sebagaimana diketahui semua latihan fisik yang diberikan memang tersaji dalam metode dan proses kegiatan atau prinsip penegakan kedisiplinan yang sangat ketat, berat, dan keras.²⁵

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.²⁶ Sekolah merupakan tempat dimana anak yang menjadi peserta didik dididik oleh guru, bukan hanya dari ilmu pengetahuan namun juga etika dan moral.

Sedangkan pengertian dari yayasan adalah badan yang didirikan dengan maksud mengesahkan sesuatu.²⁷ Lalu militer adalah ketentaraan.²⁸ Yayasan Militer merupakan badan yang didirikan oleh ketentaraan TNI sebagai bentuk pengabdian masyarakat, biasanya berupa kesehatan dan pendidikan. Nilai-nilai keteladanan mengenai kedisiplinan prajurit dalam militer tertuang dalam Sumpah Prajurit TNI ABRI pada janji yang keempat yaitu Memegang teguh disiplin tentara, berarti

²⁵ Mulyanto, *Menata Sistem Pendidikan Akademi TNI: Sebuah Pemikiran Berdasarkan Studi Banding Antara Akademi Militer Australia dan Indonesia* (Jakarta : Pusat Sejarah TNI, 2007), h. 24.

²⁶ W.J.S Poerwadarminta. *Op.Cit*, h. 637.

²⁷ *Ibid.*, h. 879.

²⁸ *Ibid.*, h. 489.

tunduk, setia, hormat serta taat pada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan. Selain itu juga tertuang dalam Sapta Marga yang berbunyi Kami prajurit angkatan bersenjata RI, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.²⁹

Persatuan Istri Tentara membentuk sebuah organisasi yang bernama (Persit), mempersatukan organisasi - organisasi istri tentara yang ada di daerah - daerah. Dalam Konferensi tersebut nama PKIT (Persatuan Keluarga Istri Tentara) diubah menjadi Persatuan Istri Tentara (Persit) atas saran Ny. Hamara Effendi. Selanjutnya kegiatan Persit semakin meningkat seiring dengan perkembangan organisasi TNI AD. Sesuai dengan situasi perkembangan negara RI menghendaki diadakannya penyempurnaan dalam organisasi AD maka dengan Surat Keputusan Kasad no 952 / X / 1959 tanggal 24 Oktober 1959 telah dilaksanakan reorganisasi / reformasi dengan pembagian wilayah dalam berbagai Kodam, bagi daerah Jakarta Raya telah ditetapkan menjadi Komando Daerah Militer V / Jayakarta, meliputi daerah hukum daerah khusus Ibukota Jakarta Raya ditambah dengan Daerah Tingkat II Bekasi. Pada tanggal 19 Januari 1960 diubah menjadi Komando Daerah Militer Jaya / Jayakarta. Ditunjuk sebagai Pangdam Jaya yang pertama adalah Kolonel Inf Umar Wirahadikusumah (1960 - 1965) dan sesuai dengan kongres Persit yang ke VIII tahun 1964 yang menghasilkan keputusan penting salah satunya adalah pemimpin Persit dijabat oleh istri pemimpin TNI AD secara fungsional di bawah organisasi ini terbentuklah yayasan bernama Kartika Jaya dan mempunyai cabang Jayakarta,

²⁹ MAKO AKABRI, *Sejarah Akademi Militer Bersenjata RI (1945-1971)*, h. iv.

Kodam Jaya yang memiliki 20 buah sekolah TK, 6 buah SD, 2 buah SMP, satu buah SMA dan 2 buah SMK. Dalam penelitian ini akan meneliti SMA Kartika X-1 yang berada di jalan raya Kodam Bintaro nomor 1, Jakarta Selatan.³⁰

SMA Kartika X-1 adalah sekolah yang berada dibawah yayasan Kartika Jaya yang kental dengan nilai-nilai kehidupan militer sehingga tidak menutup kemungkinan sistem pelaksanaan tata tertib juga menganut sistem militer walau tidak sepenuhnya. Sistem pendidikan militer mempunyai karakteristik yang khas, Khusus di lingkungan militer (TNI), Pembentukan kepemimpinan para calon perwiranya secara formal diawali pada proses pendidikan/pelatihan yang diterima pertama kali di lembaga pendidikan, yaitu di akademi TNI, sekolah perwira atau calon perwira TNI. Kekhasan pendidikan militer dimanapun di dunia ini terletak pada faktor kedisiplinan dan keketatan dalam menerapkan sistem pendidikan/pelatihan. Tujuan pendidikannya pada prinsipnya untuk membentuk seorang prajurit profesional dalam tugas pertempuran.

Disini dapat dipahami bahwa pendidikan militer memiliki karakteristik yang kuat dan tegas dalam tanggungjawab terhadap peraturan-peraturan yang mengikat, sementara sekolah sebagai lembaga yang mendidik peserta didiknya mempunyai kewajiban untuk mencetak generasi yang disiplin dan taat pada peraturan ketika berada dalam lingkungannya. SMA Kartika X-1 yang berada dibawah yayasan Kartika Jaya Kodam Bintaro diindikasikan ada beberapa hal dalam penegakan atau pelaksanaan tata tertib menggunakan nilai-nilai militer yang keras, tegas dan kuat.

³⁰ <http://www.persit-kckjaya.org/sejarah> diunduh pada 20 Desember 2011, pukul.15.30 WIB.

Nilai atau prinsip militer ini bila di gunakan dalam pelaksanaan tata tertib di sekolah bisa diartikan penegakan secara fisik atau ketepatan dan konsistensi yang mendalam pada pelaksanaan tata tertib di lapangan. Kebiasaan ini yang membuat penelitian harus dilakukan, dimana sistem militer sendiri dikenal dengan sifat yang tertutup dan kaku, terbukti dalam penggunaan sumber literatur atau teori militer dalam penelitian ini kurang begitu banyak.

Patrimonialisme

Emerson menggunakan pendekatan kultural yang berasumsi bahwa birokrasi di Indonesia telah memperlihatkan tradisi dan budaya politik Jawa yang berkarakter patrimonial dimana jabatan dan seluruh susunan birokrasi didasarkan pada hubungan personal atau patron-client. Dalam karakter patrimonial, pemegang kekuasaan dan segala kekuasaannya dilihat sebagai satu kesatuan.³¹

Soedjatmoko menulis juga tentang munculnya pemerintah modernizing bureaucratic state (MBS) yang memperlihatkan kecenderungan meluasnya peranan birokrasi. Ada kecenderungan otoritarianisme dan sentralisasi dalam MBS sebagai ciri kebudayaan politik. Negara patrimonial.³²

Militer ditentukan oleh suatu kepemimpinan yang menguasainya. Dari kepemimpinan militer mengandung unsur yang keras dan kaku, sebagai contoh inilah ciri-ciri kepemimpinan militeristis. Tipe kepemimpinan militeristis:

- Gaya/sok militer
- Mirip otoriter
- Sistem perintah/komando

³¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 221.

³² *Ibid.*, h. 223.

- Formalistis
- Bawahan patuh mutlak
- Disiplin keras, kaku
- Komunikasi searah
- Tidak menghendaki saran, usul, kritikan-kritikan³³

Selain itu tipe kepemimpinan militer juga diterangkan kepemimpinan bersifat otokratis yaitu pemimpin bergaya diktator, yang selalu otoriter, mengikuti kehendaknya sendiri saja, tukang perintah, tidak ingin dibantah, dan tidak meminta pendapat pengikutnya.³⁴

Pengertian Weber tentang "dominasi patrimonial", dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hierarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi dan hubungan "bapak-anak buah" atau patron-client relationship.

Ciri-ciri dominasi birokrasi patrimonial ala Weber ini adalah :

1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik
2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan
3. Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik maupun administratif
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik³⁵

Kemiliteran memiliki paradigma atau gambaran bagi kebanyakan masyarakat sebagai sistem yang keras dan kaku, terpusat serta stabil sebagai fungsinya yang menjaga keamanan suatu negara. Militer didominasi sifat yang tangguh sehingga fisik menjadi ukuran baik dari bentuk dan latihannya, selain itu untuk menjaga kestabilan

³³ Komarudin Sahid. *Op.Cit*, h. 65.

³⁴ Sarlito W Sarsono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 229.

³⁵ Komarudin Sahid. *Op.Cit*, h. 123-124.

sistem militer menggunakan orang-orang yang paham dan sejalan sehingga membentuk suatu sistem kekerabatan atau *patron-client relationship*.